TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN ASAS OPPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

ABSTRACT

The opportunity principle is an authority from general attorney as the highest public prosecutor, to put aside case for the benefit of public. The objective this paper is to elaborate whether the cases that have been closed for public interest could be reopened, due to the finding the novum. The method used bibliography study. The result shows that it is especially found in Indonesia which is recognized as legality principle, means, who is guilty is obliged to be claimed by law, as a matter of fact is against to the opportunity

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah suatu negara hukum, maksudnya Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak atas kekuasaan belaka. Menurut Satjipto Rahardjo; (1982) bahwa sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum, maka prinsip peraturan perundangan yang berlaku, harus dipegang secara teguh dan mengedepan dalam setiap tindak penyelenggaraan pemertintah di Indonesia. Prinsip tersebut menjelma dalam 3 unsur utama, yakni: (1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, (3) Legalitas dalam arti hukum, baik formil dan materil

Prinsip-prinsip di atas harus ditafsirkan secara dinamis artinya penafsiran didasarkan pada kondisi dan waktu tertentu pada saat kejadian, untuk menentukan sanksi bagi pelaku. Dalam pelaksanaannya hukum harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan aspirasi di dalam masyarakat. Hukum diwujudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan, maka hal itu akan membantu kelancaran usaha-usaha pembangunan dibidang hukum demi mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Keseimbangan dan keserasian di satu segi berarti tindakan tegas bagi setiap pelanggar yang sesuai dengan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku dan disegi lain berarti perlindungan bagi setiap orang yang tidak melanggar hukum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu asas yang dikenal dalam penegakan hukum di Indonesia, adalah asas opportunitas yaitu suatu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum. Asas ini sudah lama dianut di Hindia Belanda, dan sudah sangat tua usianya. (Djoko Prakoso;1985) Dengan asas opportunitas yang terkandung dalam wewenang dan posisi penuntut umum, dalam kewenangannya untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran, maka karena jabatannya jika dipandang perlu melakukan sesuatu bertentangan dengan sifat tugas, pekerjaan dari penuntut umum. Hal ini merupakan titik tolak dan dasar serta alasan mengapa kepada jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam negara hukum diberi wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan atas dasar kepentingan umum, maka ketentuan hukum pun tetap menjadi prioritas pertama dalam melakukan penuntutan maupun mendeponerkan suatu kasus.

Pengertian kepentingan umum adalah luas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata-mata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain, yang antara lain alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Dalam mendasarkan

mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas dan terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan antara sosial antara manusia pribadi dengan manusia-manusia lainnya untuk mencapai/memperoleh kepentingan.

Uraian di atas mengungkapkan bahwa terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan penerapan asas *opportunitas*, terutama dalam bidang hukum pidana. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya tentang pembatasan dan penggunaan wewenang menerapkan asas *opportunitas*, siapa saja yang berwenang menggunakannya, serta kapan dapat diterapkan, serta alasan demi kepentingan apa atau siapa. Oleh karena itu, permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Berdasarkan alasan dan pertimbangan apakah asas *opportunitas* diberlakukan? (2) Bagaimana penerapan asas *opportunitas*?

PENBAHASAN

Arti Dan Maksud Asas *Opportunitas*

Menurut Andi Hamzah; (2006) bahwa Arti sehari-hari *opportunitas* ialah ketika atau kesempatan yang baik, ditinjau dari segi yuridis, maka asas *opportunitas* keputusan tidak hanya tergantung dari penyelidikan tapi juga dari pernyataan-pernyataan khusus, dan putusan jaksa harus memenuhi tuntutan keadilan dan persamaan hukum. Rancangan undang-undang hukum acara pidana, secara jelas tidak menyebutkan asas *opportunitas* tapi hanya menetapkan penyampingan perkara yang tidak atau belum lengkap alat pembuktiannya dan perkara yang terbukti tidak merupakan perbuatan pidana, yang semuanya tidak dikuasai asas *opportunitas*,

Pasal 140 (2) a Rancangan undang-undang hukum acara pidana berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan." Adapun perkara yang belum cukup perkara adalah logis kalau

disimpan sementara sambil diadakan penyidikan lebih lanjut, tetapi perkara-perkara yang nyata-nyata bukan delik, jangan rasanya kalau masih bias dituntut, karena bertentangan dengan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penyampingan Perkara

Kriteria demi kepentingan umum adalah kepentingan negara dan masyarakat, maka yang perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai arti dari kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri maupun mengenai pelaksanaan dari wewenang Jaksa Agung menyampingkan perkara demi kepentingan umum. (Djoko Prakoso;1985). Sesuai dengan bunyi pasal 35 c undang-undang nomor 16 tahun 2004 beserta penjelasannya mengisyaratkan agar jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara yang menyangkut kepentingan umum senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada hubungannya dengan perkara tersebut misalnya antara lain dengan kapolri, menhankam, bahkan juga langsung kepada presiden.

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, setiap ketentuan pidana yang dilanggar maka perlu diambil suatu tindakan untuk memulihkan keadaan, di mana tindakan itu berupa sanksi yang tegas, sehingga keadaan masyarakat bisa tentram, aman dan lancar. Konsep sosial tentang sistem hukum akan terlihat jelas kaitannya antara hukum dan masyarakat, apabila dihubungkan dengan ilmu hukum sosiologi, antara lain disebutkan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kepentingan negara dan masyarakat sifatnya sangat luas karena meliputi segala segi aspek kehidupan yang meliputi ideologi, ekonomi, sosial budaya dan keamanan pertahanan perlu dijaga dari segala ancaman dan bahaya, sebab pada hakekatnya kesemua bidang kehidupan tersebut merupakan sarana mutlak untuk terciptanya stabilitas nasional yang mantap di segala bidang. Dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum, karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain.

Penuntut umum tidak melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan kepada proporsi yang sebenarnya.

Pengertian kepentingan umum sendiri, tidak ada batasan yang jelas, dalam peraturan perundang-undangannya, untuk itu permasalahannya harus kita kembalikan kepada tujuan hukum atau cita-cita hukum. Cita-cita hukum bagi bangsa Indonesia diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kepentingan umum, terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak melakukan penuntutan yaitu:

1. Kepentingan Negara

Penuntutan akan berakibat pengumuman yang tidak dikehendaki dari rahasia negara, dan jika dituntut akan ada aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang, sehingga kecurigaan pada rakyat akan menyebabkan kerugian pada negara.

2. Kepentingan Masyarakat

Tidak menuntut perbuatan-perbuatan pidana, yang dapat disalahkan pada suatu perbuatan yang secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah berubah dalam masyarakat, tentang pantas atau tidaknya dihukum beberapa perbuatan delik susila.

3. Kepentingan Pribadi

Perkara-perkara kecil, jika sipelaku telah membayar kerugian, maka masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. Bagi sipetindak sendiri kepentingan-kepentingan pribadinya terlampaui berat terkena jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat.

Asas Opportunitas di samping Asas Legalitas

Selain asas opportunitas yang dianut di Indonesia, asas legalitas juga merupakan asas yang diterapkan, yang menentukan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus dituntut. KUHAP sebagai

kitab undang-undang hukum acara pidana berdasarkan asas legalitas, dimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan sebagai berikut: (1) Sama derajat dihadapan hukum, (2) Mempunyai kedudukan *perlindungan yang sama* oleh hukum, (3) Mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum

Pengertian kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia dapat dipakai sebagai kepentingan yang diatur, dilindungi, dan dipelihara dalam hukum nasional Indonesia, misalnya kepentingan internasional, kepentingan Kolonial dan sebagainya. Kepentingan negara tercermin dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, khususnya bagi penyelenggaraan wewenang dan tugas pemerintahan akan tercermin dalam departemen dan lembaga non departemen. Sehingga dapat dikatakan adanya kepentingan pendidikan dan kebudayaan, kepentingan perekonomian negara, kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Kepentingan umum menurut hukum adat harus ditinjau dari segi persekutuan hukum adat, karena hukum adat berlaku sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan aturan hukum tidak tertulis, hal ini disebabkan karena sifat tradisionalnya yang luhur, dapat berubah dan mampu menyesuaikan diri. Dengan sifat-sifat yang ada pada hukum adat, maka hukum adat tetap mendapatkan tempat sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia, dan dapat memberikan bahan-bahan penting sebagai sumber materiil dalam pembangunan di bidang hukum.

Peranan pasif dapat dijadikan obyek pengaturan dari peraturan hukum, sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut menurut peraturan perundangan. Perbedaan konsepsi tentang kepentingan umum tersebut tidak semata-mata terletak pada perbedaan mengenai sifat tertulis dan tidak tertulisnya aturan hukum yang mengatur, melindungi, dan memelihara kepentingan hukum itu sendiri.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan

kewenangan pada jaksa agung adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Dengan demikian satu-satunya pejabat di negara kita yang berwenang melaksanakan asas oportunitas adalah jaksa agung dan tidak kepada setiap penuntut umum. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, jaksa agung menunangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. (Anton Sujata; 2000). Para ahli hukum menilai bahwa hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, dan nilai-nilai tersebut disebut kaidah, baik kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah aganma dan kaidah hukum.

Sehubungan dengan hak asasi manusia, maka dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa "segala warga negara negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya." Selanjutnya adanya anggapan yang telah disebutkan di atas, persoalan ini telah diberikan suatu jawaban yang tegas yaitu dalam pasal 5 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Adanya anggapan-anggapan inilah yang menimbulkan permasalahan dan mungkin mengakibatkan kemerosotan wibawa hukum apabila perkara dikesampingkan.

Sebagai diketahui bahwa hukum adalah kaidah atau norma sosial, hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan kontribusi dalam masyarakat. Namun keadaan yang demikian tidak selaras dengan perkembangan masyarakat, hal ini disebabkan karena kaidah-kaidah hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang cepat lajunya.

Tuntutan yang cukup kuat menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas oportunitas. Dalam Garis-Garis Besar

Haluan Negara disebutkan bahwa usaha penegakan hukum juga meliputi kegiatan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak-penegaknya. (Purnadi Purbacaraka;1977). Penegak hukum yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang disebut aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan dalam pengertian luas meliputi tugas tugas dari pembentuk hukum/undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan eksekusi lain. (KUHP Nomor 8 tahun 1981)

Kewenangan penerapan asas Oportunitas

Dalam hal ini antara perkara yang ditutup demi hukum dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum (asas oportunitas), tidak sama, karena:

1. **Demi hukum** tidak sama pengertiannya dengan **demi kepentingan umum**, sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain dari kepentingan individu.
2. Ternyata perkara yang ditutup **demi hukum**, tidak di sampingkan secara definitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara yang ditutup definitif demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali.

Menurut Djoko Prakoso (1985) bahwa ketentuan pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, merumuskan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dari ketentuan tersebut di atas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Wewenang Jaksa Agung

Wewenang adalah peranan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum untuk bertindak terhadap suatu atau mengenai sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan wewenang Jaksa Agung sehubungan dengan asas oportunitas, yakni wewenang jaksa agung yang diberikan oleh hukum untuk tidak menuntut seseorang dalam suatu perkara. Jaksa dalam melakukan penuntutan dalam hal penyampingan perkara, karena tugas dan kewajibannya, seperti yang tersirat dalam undang-undang pokok kejaksaan. Penyampingan perkara dilakukan

karena perintah atasan, dan bermusyawarah dengan Menhankam, Kepala kepolisian, dan juga Presiden untuk melihat sejauh mana penyimpangan perkara dapat dilakukan apabila hal tersebut mengganggu ketertiban umum.

2. Tindakan Menyimpangkan Perkara

Tindakan penyimpangan perkara dalam proses pidana dimaksudkan untuk tidak diadakan penuntutan oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum, merupakan pengecualian dari prinsip legalitas yang mengharuskan Jaksa untuk menuntut setiap pelanggaran pidana dan dapat dibuktikan. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 2 (dua) alasan, yang dapat dijadikan alasan penyimpangan perkara, yakni:

- a. Penyimpangan perkara berdasarkan asas *opportunitas* karena alasan demi kepentingan umum (Pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
- b. Penyimpangan perkara karena alasan demi kepentingan hukum (Pasal 14 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Sedangkan pada **Penghentian Penuntutan** alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri, yakni:

- a. Perkara yang bersangkutan **tidak mempunyai pembuktian yang cukup**, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidik pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan, yang didakwakan tidak terbukti.
- b. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

c. Atas dasar perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan adalah sesuatu tindak pidana yang terdakwa oleh hukum itu sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan.

3. Demi kepentingan umum

Batasan dari pengertian kepentingan umum

sebagaimana dirunuskan dalam penjelasan pasal 35 (c) undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, ternyata belum memberikan pembatasan yang jelas, oleh karena itu permasalahan tersebut, hendaklah dikembalikan kepada tujuan hukum atau cita-cita hukum. Cita-cita hukum bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (UU No.16 thn 2004) Terdapat 2 (dua) pertimbangan yang menjadi dasar diadakannya asas *opportunitas*, yakni kepentingan individu dan kepentingan umum. (www.google.com)

1. Kepentingan individu si pelaku sendiri akan terganggu dirugikan bila ia sampai dipidana atau di hukum, hukuman yang teringgapun untuk jenis kesalahannya, bila dijatuhkan dirasakan lebih berat, daripada kesalahannya yang mengganggu kepentingan umum. Dengan demikian dilakukannya terlampau kecil atau terlampau ringan, sehingga hanya sedikit sekali menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

2. Kepentingan umum yang dipertimbangkan yakni jika akan lebih terganggu kalau tidak dilakukan penyimpangan perkara, sebab jika perkara tersebut disidangkan mungkin akan menimbulkan akibat, antara lain :

- a. Wibawa pemerinah akan merosot di mata hukum
- b. Masyarakat merasa dirugikan pula, misalnya bila masyarakat mempunyai kepentingan yang terpengaruh secara menguntungkan karena disidangkannya perkara tersebut.

c. Tujuan dari nilai akhir kesetimpalan dalam hukum pidana tentu saja adalah keadilan, yang pasti harus dicapai melalui berbagai kebijaksanaan yang tepat dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi.

Bertolak dari uraian di atas, diperoleh penegasan mengenai kepentingan umum sebagai berikut :

1. Kepentingan umum mempunyai arti sangat luas, mencakup kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat, dengan demikian dalam pengertian kepentingan umum harus memberikan manfaat bagi umum.

2. Kepentingan tersebut merupakan himpunan dari kepentingan individu dari masyarakat, yang berarti dapat menjamin perlindungan terhadap individu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Asas oportunitas diberlakukan berdasarkan alasan dan pertimbangan jika memberikan manfaat kepada kepentingan umum untuk tidak menuntut perkara pidana ke muka hukum, kepentingan umum lebih diartikan kepada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
2. Penerapan asas oportunitas dilakukan oleh Jaksa Agung dengan bermusyawarah kepada Kapolri, Menhankam, dan Presiden untuk mendapatkan masukan, dan mengetahui lebih jelas bahwa dalam suatu tindak pidana diperlukan penyimpangan perkara demi kepentingan umum.

Saran-saran

1. Penerapan asas oportunitas di Indonesia, tidak hanya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 c, tetapi bisa juga diatur dalam Peraturan lain, yang mengisyaratkan bahwa di Indonesia, dikenal adanya penyimpangan perkara demi kepentingan umum.
2. Dalam kasus yang ditutup oleh Jaksa Agung, karena didasarkan pada kepentingan umum, sebaiknya harus diberikan batasan yang jelas kepada masyarakat luas tentang pengertian kepentingan umum, penghentian penuntutan dan tidak cukup bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Anton Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Pumadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- _____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan

www.google.com

KEJAYAAN

SUATU NEGARA

SANGAT

DITENTUKAN

OLEH

KEBERHASILAN

PENEGAKAN HUKUM

YANG ADIL

BAGI SETIAP

ORANG